

**UNDANG - UNDANG R.I. No.32 Th. 2002
dan
PERATURAN MENKOMINFO Th. 2007
TENTANG
PENYIARAN
&
UNDANG - UNDANG R.I. No.40 Th. 1999
TENTANG
PERS**

DILENGKAPI :

- PP RI No.11, 12&13 Th.2005
- PP RI No.49, 50, 51&52 Th.2005
- PERATURAN KPI No.2 & 3 Th.2006
- PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI No.17 Th .2006 TENTANG CARA PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
- PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI No.7 Th .2007 TENTANG STANDAR PENYIARAN DIGITAL TERESTRIAL UNTUK TELEVISI TIDAK BERGERAK DI INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI No.8 Th .2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

MEMERINTAHKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
DITEMUKAN DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

SALASANNYA

Penerbit

"CITRA UMBARA"

Bandung

UNDANG - UNDANG R.I No. 32 Th. 2002
dan
Peraturan Menkominfo Tahun 2007
tentang
PENYIARAN
&
UNDANG - UNDANG R.I
Nomor 40 Tahun 1999
tentang
PERS

Cetakan I, Nopember 2007
Cetakan II, Nopember 2010
Cetakan III, Juli 2011

Penerbit "Citra Umbara" Bandung

KATA PENGANTAR

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang memberikan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan bertanggungjawab. Maka dari itu perlu adanya undang-undang dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan penyiaran sehingga peran penting lembaga penyiaran tersebut dapat optimal.

Buku ini berisi tentang Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Penyiaran dan Pers.

Harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan. Amin

Bandung, Oktober 2007

Penerbit



Citra Umbara - i

DAFTAR ISI

UU RI No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran	1
Penjelasan atas UU RI No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran	36
PP RI No. 11 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	46
Penjelasan atas PP No. 11 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.....	79
PP RI No. 12 Th. 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	95
Penjelasan atas PP No. 12 Th. 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116
PP RI No. 13 Th. 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	125
Penjelasan atas PP No. 13 Th. 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	146
PP RI No. 49 Th. 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	155
Penjelasan atas PP RI No. 49 Th. 2005	159
PP RI No. 50 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	162
Penjelasan atas PP RI No. 50 Th. 2005	208
PP RI No. 51 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	229
Penjelasan atas PP RI No. 51 Th. 2005	259

PP RI No. 52 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	272
Penjelasan atas PP RI No. 52 Th. 2005	310
Peraturan KPI No. 2/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ..	328
Peraturan KPI No. 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran	368
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Th. 2006.....	405
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 7 Th. 2007	415
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Th. 2007	419
UU RI No. 40 Th. 1999 tentang Pers	438
Penjelasan atas UU RI No. 40 Th. 1999 tentang Pers.....	449